BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Kredit adalah suatu kegiatan penyediaan uang atau dana yang disediakan oleh bank, salah satu badan usaha yang kegiatan utamanya adalah membuat kredit. Uang ini akan diserahkan kepada debitur sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, sehingga setiap debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan setiap dana yang dipinjam sesuai dengan kesepakatan. Undang Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan mengatakan bahwa kredit merupakan kegiatan penyediaan tagihan ataupun bentuk lainnya yang terjadi atas kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lainnya. Pihak lainnya yang dimaksud adalah setiap pribadi atau badan yang mendapatkan kredit dari bank. Ketentuan perkreditan yang dimiliki oleh setiap bank cukup beragam baik dari sisi biaya bunga, jatuh tempo, maupun persyaratan untuk memiliki kredit.

Tujuan utama dari pemberian suatu kredit menurut Kasmir (Kasmir, 2009) adalah sebagai berikut :

a. Memperoleh keuntungan

Dana yang diperoleh dari kredit dikembalikan kepada bank bersamaan dengan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Bunga ini akan menjadi hasil dari pemberian kredit tersebut.

b. Membantu nasabah dalam membangun usaha

Sebagian besar nasabah yang mengajukan kredit menggunakan dana yang diperoleh untuk membangun dan melanjutkan usaha yang dimilikinya.

c. Membantu pembangunan pemerintah

Pemanfaatan kredit sebagai modal usaha akan membantu masyarakat untuk mendorong pembangunan ekonomi pemerintah.

2.1.2 Prinsip dan Dasar Pemberian Kredit

Suatu pemberian kredit perlu dilakukan berdasarkan prinsip dan aturan tertentu. Hal tersebut dikarenakan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank memiliki risiko yang cukup tinggi apabila tidak dilakukan sesuai dengan prinsip atau standar yang berlaku. Menurut Kasmir (Kasmir, 2009) terdapat analisis 5C dan 7P terkait dengan penilaian yang akan dilakukan terhadap calon nasabah yaitu:

Analisis 5C

a) *Character*

Pemberian suatu kredit didasari atas dasar kepercayaan pihak bank terhadap peminjam. Bank akan dapat mempercayai peminjam apabila peminjam dikenal sebagai pribadi yang memiliki sifat positif dan terpercaya. Selain itu, bank akan dengan mudah memberikan kepercayaannya kepada peminjam apabila sebelumnya peminjam sudah dikenal kooperatif selama melakukan peminjaman sebelumnya.

b) *Capacity*

Bank atau kreditur akan melakukan penilaian terhadap nasabah yang akan melakukan kredit dengan menilai kesanggupan debitur untuk melunasi pinjamannya.

c) *Capital*

Kemampuan modal dari pihak debitur akan menjadi dasar bagi kreditur untuk menentukan apakah debitur benar-benar dapat mengalokasikan pinjamannya dengan baik atau tidak. Semakin besar modal yang dimiliki oleh usaha milik debitur maka hal tersebut menunjukkan bahwa debitur memiliki aset/modal selain pinjaman yang diterima.

d) *Condition*

Bank atau kreditur dapat melihat kemampuan debitur untuk membayar pinjamannya dengan menilai kondisi dari debitur maupun kondisi ekonomi makro. Dengan penilaian kondisi tersebut maka bank mampu untuk menghindari ataupun mempersiapkan segala kemungkinan risiko yang akan datang terkait dengan pinjaman.

e) *Collateral*

Segala jaminan yang diberikan oleh debitur hendaknya melebihi nilai dari pinjaman yang diberikan kepada debitur. Hal ini bertujuan untuk menghindari risiko di waktu yang akan datang apabila debitur tidak mampu untuk melunasi pinjamannya.

Analisis 7P

a) *Personality,* kreditur dapat menilai debitur dari sisi kepribadiannya sehari-hari.
b) *Party,* dalam hal ini, kreditur dapat menggolongkan nasabahnya kedalam beberapa golongan tertentu berdasarkan dengan modal dan kondisi dari masing-masing debitur.
c) *Purpose,* dalam hal ini, perlu diketahui tujuan nasabah ketika mengambil pinjaman. Hal ini bertujuan untuk mengetahui arah aliran uang serta jenis kredit yang akan diberikan kepada debitur.
d) *Prospect,* kreditur perlu menilai usaha dari calon debiturnya, apakah memberi prospek yang baik atau buruk.
e) Payment, dimana kreditur perlu mengukur dari mana sumber dana yang dimiliki oleh debitur untuk membayar pinjamannya.
f) *Profitability,* hal ini diperlukan untuk mengukur bagaimana nasabah mampu menghasilkan laba seiring dengan bertambahnya kredit yang diterima oleh nasabah tersebut.
g) *Protection,* bertujuan untuk menjamin bahwa pinjaman yang diberikan kepada debitur dapat dikembalikan.

2.2 Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program yang dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Program KUR ini mendukung akses penyaluran dana kredit melalui bank penyalur kepada UMKM. Dana yang diperoleh dari kredit ini digunakan

untuk keperluan modal bagi setiap pelaku UMKM yang memiliki usaha produktif yang belum memiliki agunan atau agunan tambahan belum cukup. Tujuan dari adanya program ini adalah:

a. Meningkatkan dan memperluas akses penerimaan modal usaha kepada setiap pihak yang memiliki usaha produktif
b. Meningkatkan kapasitas daya saing bagi setiap UMKM
c. Mendorong pertumbuhan ekonomi
d. Menambah peluang kerja

Kredit Usaha Rakyat ini dapat mendorong masyarakat untuk memulai maupun melanjutkan usahanya. Hal ini memberikan dampak yang baik bagi pemerintah karena mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ini dapat terjadi karena dengan adanya usaha baru yang dimulai akan membuka lapangan pekerjaan yang baru sehingga mampu mengurangi tingkat pengangguran yang ada. Terbukti pada tahun 2019, UMKM di Indonesia memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,51% dengan jumlah usaha yang tercatat sebanyak 65,46 unit usaha.

Dana yang disalurkan oleh penyalur KUR merujuk pada basis data yang tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). Sistem ini disusun oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan merujuk pada basis data dari kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah, penyalur KUR, dan perusahaan penjamin KUR. Sistem SIKP ini akan menampilkan skema target dan realisasi KUR yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Dengan adanya data yang merujuk

pada data pemerintah daerah, maka sistem in akan memunculkan skema plafon dan realisasi KUR berdasarkan provinsi.

KUR yang disalurkan kepada nasabah bersumber dari dana perbankan yang sudah dipersiapkan untuk keperluan modal kerja yang kemudian akan disalurkan kepada pelaku UMKM yang memiliki usaha *feasible* namun belum *bankable*. Sejak Agustus 2015, KUR yang sebelumnya menggunakan kerangka Imbal Jasa Penjaminan (IJP) kini menggunakan kerangka subsidi bunga. Subsidi bunga ini memberikan kemudahan kepada penerima KUR karena sebagian bunga menjadi beban pemerintah. Bunga yang menjadi beban adalah selisih dari tingkat bunga yang diterima oleh bank dengan tingkat bunga yang menjadi beban debitur. Berikut merupakan realisasi penyaluran KUR per tahun, jumlah debitur KUR per tahun dan suku bunga KUR per tahun dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020:

Gambar II. 1 Grafik penyaluran KUR dari Pemerintah per Tahun

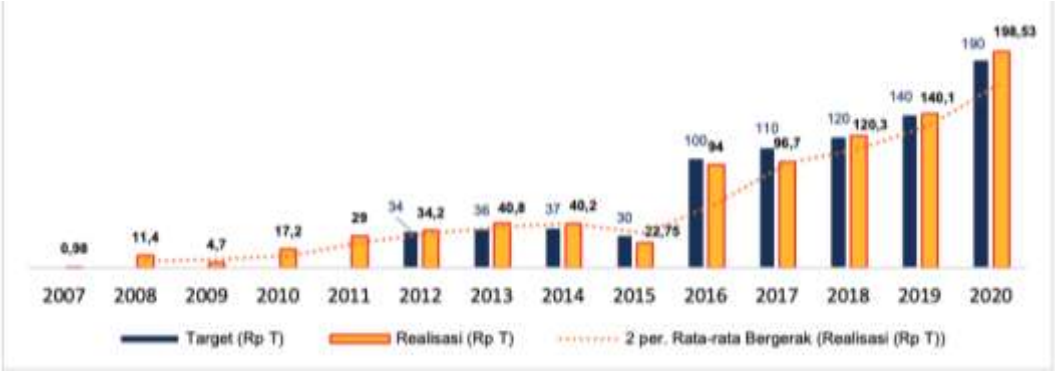

Sumber : Data Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM

Gambar II. 2 Grafik Debitur KUR per Tahun (orang juta)

Sumber : Data Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM

Gambar II. 3 Suku bunga KUR per Tahun

Sumber : Data Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM

2.3 Pemberian Kredit Usaha Rakyat Pada Bank BRI

Bank Rakyat Indonesia menyediakan Kredit Modal Kerja dengan plafon kredit hingga Rp500.000.000 yang diberikan kepada pelaku UMKM dengan usaha produktif. Pemberian kredit ini bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan UMKM dengan bank serta membantu UMKM untuk memahami bagaimana menjadi debitur yang terjamin.

Berdasarkan data skema yang diambil dari Sistem Informasi Kredit Program yang dibuat oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sampai dengan bulan April tahun 2022 pemerintah memiliki plafon sebesar Rp

1.335.585.585.000.000,00. Dari data tersebut, diketahui juga bahwa realisasi penyaluran KUR sebesar RP 1.060.486.519.000.000,00 dengan total debitur sebanyak 37.815.851 orang. Penyebaran plafon dan realisasi KUR yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel II. 1 Skema KUR di Indonesia (dalam jutaan rupiah)

SKEMA KUR	Plafon	Akad	Jumlah Debitur
Skema KUR Mikro	Rp 866.795.369	Rp 683.842.863	30.064.501
Skema KUR Retail	Rp 460.062.649	Rp 355.899.529	2.101.933
Skema KUR TKI	Rp 7.226.566	Rp 2.228.653	146.38.00
Skema KUR UMI	Rp 1.500.000	Rp 18.515.474	5.503.037
Total	**Rp 1.335.584.584**	**Rp 1.060.486.519**	**37.669.477**

Sumber : Sistem Informasi Kredit Program

Berdasarkan plafon yang tersebar tersebut, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki bagian plafon dan realisasi terbesar di Indonesia. Hingga bulan April tahun 2022, BRI memiliki plafon sebesar RP 926.568.388.000.000 atau 69% dari besaran plafon secara keseluruhan. Sedangkan realisasi KUR pada BRI adalah sebesar Rp 727.518.004 atau sebesar 69% dari realisasi atau akad secara keseluruhan. Sedangkan jumlah debitur yang menerima kredit dari BRI adalah sebanyak 30.551.629 atau sebesar 81% dari keseluruhan jumlah debitur yang tercatat dalam SIKP. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia dinilai mampu untuk menyalurkan kredit secara maksimal.

2.4 Sistem Pengendalian Internal

2.4.1 Pengertian Pengendalian Internal

Sistem Pengendalian Internal merupakan salah satu kegiatan yang perlu dilakukan oleh setiap dewan komisaris, manajemen, dan pihak lainnya untuk memberikan keyakinan terkait dengan keandalan, kepatuhan, serta efektivitas dan efisiensi pelaporan keuangan. Sistem pengendalian internal meliputi struktur perusahaan, metode yang digunakan untuk menjaga aset perusahaan, proses penyusunan data akuntansi yang teliti dan andal, dan kebijakan manajemen (Mulyadi, 2010). Dengan adanya sistem pengendalian internal, bank dapat menjamin bahwa setiap informasi yang terdapat dalam laporan keuangan yang dibuatnya dapat dipercaya. Selain itu, bank juga dapat menjaga setiap aset yang dimilikinya.

Pengendalian internal ini mengarah pada proses yang dilakukan untuk membantu perusahaan mencapai tujuan tertentu. Hal ini dipengaruhi oleh peraturan yang ada, sumber daya manusia, serta teknologi informasi yang tersedia. Dengan demikian, perlu adanya pemahaman menyeluruh serta kemampuan untuk menganalisa risiko teknologi informasi serta bagaimana menggunakannya. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan rancangan sistem pengendalian internal yang efektif serta kontrol yang baik terhadap sistem informasi akuntansi perusahaan. Menurut Romney dan Steinbart (Romney & Steinbart, 2015) pengendalian internal dibagi menjadi dua kategori, pengendalian secara umum dan pengendalian dengan aplikasi.

2.4.2 Tujuan dan Fungsi Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (Romney & Steinbart, 2015) tujuan pengendalian internal adalah sebagai berikut:

a) Menjamin bahwa aset perusahaan aman dan jauh dari transaksi yang tidak sah.
b) Memelihara catatan akuntansi guna melaporkan aset perusahaan secara benar dan akurat.
c) Memberikan informasi dengan cermat dan dapat diandalkan.
d) Menyusun laporan keuangan sesuai dengan ketentuan
e) Meningkatkan efisiensi operasional perusahaan
f) Mendorong kepatuhan terhadap kebijakan manajerial yang sudah ditentukan serta mematuhi peraturan yang berlaku

Sedangkan fungsi dari pengendalian internal adalah sebagai berikut:

a) Kontrol preventif guna mencegah munculnya suatu masalah
b) Kontrol detektif guna menemukan masalah yang sebelumnya gagal dicegah
c) Kontrol korektif guna mengidentifikasi serta memperbaiki masalah yang timbul

2.5 Sistem Pengendalian Internal Menurut COSO

Dalam buku yang ditulis oleh Romney dan Steinbart (Romney & Steinbart, 2015) disebutkan bahwa COSO mengembangkan model *Enterprise Risk Management-Integrated Framework* (ERM) guna menetapkan strategi, mengidentifikasi masalah, menilai dan mengelola risiko, serta memberikan jaminan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya. Hal ini didasari bahwa perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya, sehingga manajemen harus mampu memutuskan bagaimana perusahaan mampu

menentukan ketidakpastian yang mungkin terjadi selama mendapatkan nilai tersebut. Ketidakpastian tersebut mampu menghasilkan risiko yang mungkin membawa dampak negatif maupun positif bagi perusahaan, yang tentunya akan mempengaruhi nilai perusahaan tersebut. Kerangka ERM ini dibuat untuk mengelola ketidakpastian tersebut guna menciptakan dan mempertahankan nilai yang ada.

2.6 Komponen Pengendalian Internal (ERM)

Menurut Romney dan Steinbart (Romney & Steinbart, 2015) komponen pengendalian internal COSO adalah sebagai berikut:

Gambar II. 4 Model Manajemen Risiko COSO

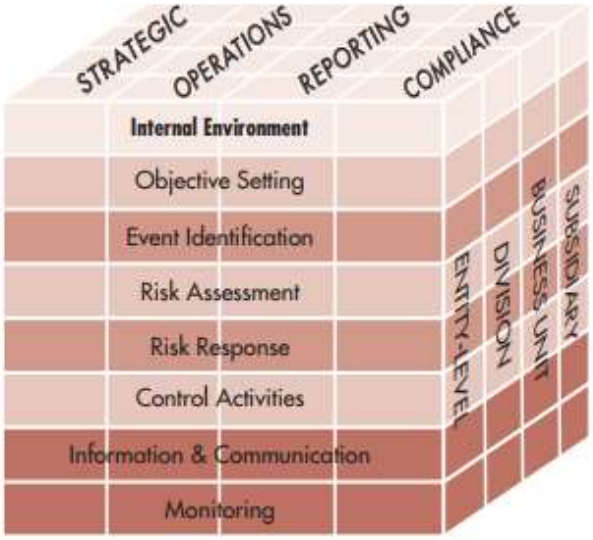

Sumber : Romney dan Steinbart (2015)

2.6.1 Pengendalian Lingkungan Internal

Lingkungan internal suatu perusahaan dapat mempengaruhi bagaimana suatu perusahaan menetapkan strategi dan tujuannya. Lingkungan pengendalian

ini mencerminkan perilaku dan perbuatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan pengendalian internal (Mulyadi, 2010). Perusahaan yang tidak mampu mengendalikan lingkungan internalnya akan menghadapi berbagai risiko di masa yang akan mendatang. Menurut Romney dan Steinbart (Romney & Steinbart, 2015) lingkungan internal terdiri dari beberapa komponen berikut:

a) Filosofi manajemen, gaya operasi, dan selera risiko.
b) Komitmen terhadap nilai etika dan integritas.
c) Pengawasan oleh pihak berwenang.
d) Struktur perusahaan.
e) Pembagian wewenang dan tanggung jawab setiap pihak yang ada di dalam perusahaan.
f) Sumber daya manusia yang kompeten.
g) Pengaruh eksternal.

2.6.2 Pengaturan Tujuan

Pengaturan tujuan adalah suatu proses dimana manajemen perusahaan menentukan target yang ingin dicapai. Target atau tujuan ini biasa disebut sebagai visi dan misi perusahaan yang dibuat untuk memberikan arah yang lebih rinci terkait target perusahaan dan bagaimana tindakan yang harus dilakukan untuk mencapainya. Untuk mempersiapkan tujuan perusahaan dibutuhkan empat komponen utama terkait pengaturan ini. Yang pertama, sasaran strategis terkait dengan visi dan misi yang dibuat oleh perusahaan. Kedua, tujuan dari kegiatan operasional perusahaan. Ketiga, tujuan pelaporan guna memastikan keakuratan informasi akuntansi, dan yang keempat tujuan kepatuhan guna memastikan bahwa

perusahaan melakukan kegiatan dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.

2.6.2 Identifikasi Keterjadian

Romney dan Steinbart (Romney & Steinbart, 2015) mengatakan bahwa COSO mengidentifikasi suatu keterjadian sebagai kegiatan perusahaan yang dapat menghasilkan kejadian positif maupun negatif bagi kegiatan operasional perusahaan. Kejadian atau peristiwa ini dipengaruhi oleh kegiatan internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi strategi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Manajemen diharapkan mampu untuk mengantisipasi dan mengatasi segala kemungkinan adanya peristiwa positif maupun negatif. Hal ini dibutuhkan agar perusahaan mampu memahami teknik yang benar untuk mengidentifikasi dan mengatasi peristiwa yang sama di waktu yang akan datang.

2.6.3 Penilaian Risiko

Perusahaan harus mampu untuk menetapkan target operasional dengan seksama agar manajemen mampu untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang akan dihadapi. Penilaian ini dilakukan terhadap segala jenis risiko yang ada baik risiko yang dapat terjadi karena faktor alam maupun risiko seperti *fraud*. Setelah melakukan identifikasi dan penilaian terhadap risiko, manajemen juga perlu untuk membandingkan perubahan yang terjadi dari hasil penyelesaian yang ada. Hasil dari perbandingan ini dapat digunakan oleh perusahaan sebagai pengalaman guna menghasilkan dampak positif bagi perusahaan di kemudian hari.

2.6.4 Respon atas Risiko

Risiko yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan perlu dilakukan penilaian atas risiko yang ada. Setelah penilaian dilakukan perlu juga adanya

respon atas risiko tersebut. Dengan demikian, manajemen dapat menilai risiko residual sebagai bagian dari pengendalian internal sehingga risiko bisa diminimalisir. Menurut Romney dan Steinbart (Romney & Steinbart, 2015) manajemen dapat merespon suatu risiko dengan beberapa cara, diantaranya:

a) *Reduce* sebagai proses menurunkan risiko yang mungkin terjadi serta dampaknya dengan melaksanakan pengendalian internal dengan baik.
b) *Accept* sebagai tindakan menerima segala risiko dan dampak yang mungkin terjadi.
c) *Share* sebagai suatu tindakan membagikan risiko dengan pihak luar seperti asuransi. Dalam hal ini, pihak asuransi dapat membantu manajemen dalam menghadapi dampak yang terjadi karena suatu risiko yang muncul.
d) *Avoid* dapat dilakukan manajemen dengan menghindari risiko dengan tidak terlibat dalam kegiatan yang berisiko.

Risiko yang tidak dapat dihindari harus bisa diterima atau dibagi dengan skala tertentu dimana risiko tersebut masih bisa diterima.

2.6.5 Aktivitas Kontrol

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan yang telah dibentuk untuk memastikan bahwa prosedur operasional dan pengendalian yang dilakukan oleh manajemen telah sesuai (Mulyadi, 2010). Aktivitas ini menuntut manajemen untuk memastikan bahwa pengendalian sudah dipilih dan dikembangkan guna meminimalisir risiko. Selain itu, manajemen juga harus memastikan bahwa pengendalian dilakukan menggunakan teknologi yang sesuai dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Menurut Romney dan Steinbart

(Romney & Steinbart, 2015) aktivitas pengendalian dapat dilakukan sesuai dengan kategori sebagai berikut:

a) Pembagian wewenang atas transaksi dan aktivitas yang sesuai;
b) Pemisahan tugas dan fungsi;
c) Pengembangan rencana kerja dan kontrol perolehan;
d) Membagi dan mengubah kontrol dari manajemen;
e) Penggunaan dan bentuk laporan serta catatan keuangan;
f) Menjamin serta memperhatikan aset, catatan, dan data perusahaan;
g) Pemeriksaan yang tidak terikat atas kinerja manajemen dan perusahaan.

2.6.6 Informasi dan Komunikasi

Suatu organisasi harus memiliki sistem informasi dan komunikasi yang akan berguna untuk menerima serta bertukar informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk mengumpulkan dan mengkomunikasikan segala informasi yang berkaitan dengan suatu organisasi. Data terkait dengan informasi yang sudah dikumpulkan tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai bagian dari jejak audit, sehingga setiap transaksi yang terjadi dapat diketahui asalnya berdasarkan data yang sudah direkam sebelumnya.

Menurut Romney dan Steinbart terdapat tiga prinsip yang digunakan dalam proses informasi dan akuntansi dalam mendukung pengendalian internal, yaitu:

a) Mendapatkan dan menghasilkan informasi yang berguna secara langsung dan berkualitas;
b) Melakukan komunikasi informasi secara internal;

c) Mengkomunikasikan kendala terkait pengendalian internal kepada pihak eksternal.

2.6.7 Pemantauan

Pemantauan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pengendalian internal. Hasil dari pemantauan ini akan membantu perusahaan dalam melakukan evaluasi dan modifikasi atas pengendalian internal yang sudah dilaksanakan. Menurut Romney dan Steinbart (Romney & Steinbart, 2015) berikut ini merupakan beberapa prosedur yang dapat dilakukan untuk melakukan pengawasan sebagai bagian dari pengendalian internal:

a) Melakukan evaluasi atas pengendalian internal
b) Melakukan pengawasan secara efektif dengan pelatihan kepada setiap karyawan
c) Menggunakan sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan
d) Menggunakan sistem monitor dalam mencatat transaksi dan aktivitas perusahaan dan karyawannya guna mengevaluasi produktivitas dan keamanan perusahaan
e) Perusahaan harus membuat atau menggunakan perangkat lunak yang dapat menjamin keamanan data perusahaan
f) Melakukan audit secara berkala untuk menilai segala risiko yang ada serta mendeteksi adanya kesalahan ataupun penipuan
g) Mempekerjakan *computer security officer* untuk menilai dan mengevaluasi prosedur keamanan dan sistem komputer perusahaan
h) Melibatkan pihak yang paham dengan tindakan penipuan terkait dengan keuangan dan data perusahaan

2.7 Kerangka Pengendalian Internal COSO

Dalam bukunya, Romney dan Steinbart menyebutkan bahwa pada tahun 1992 COSO mengeluarkan *Internal Control-Integrated Framework* (IC). Jenis pengendalian internal ini pada akhirnya diterima oleh berbagai negara dan digunakan dalam kebijakan serta peraturan dalam rangka mengendalikan kegiatan bisnis organisasi. Seiring dengan berjalannya waktu, kerangka sistem pengendalian ini berkembang pada tahun 2013 mengalami pembaharuan. Kerangka ini memiliki lima komponen utama yang merupakan bagian dari *Internal Control-Integrated Framework* (IC). Kelima komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengendalian Lingkungan

   Pengendalian lingkungan merupakan landasan dari seluruh komponen pengendalian internal yang diterapkan oleh COSO. Sumber daya manusia merupakan inti dari aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan. Setiap individu memiliki nilai-nilai etika, kompetensi, kedisiplinan, dan integritasnya yang harus sesuai dengan ketentuan perusahaan. Untuk dapat mencapai tujuan perusahaan maka seluruh sumber daya manusianya harus mampu menggerakan perusahaan dengan baik dan benar. Prinsip yang harus dimiliki dan digunakan dalam pengendalian lingkungan ini adalah:

   a) Komitmen atas etika dan integritas.
   b) Pengawasan atas pengendalian yang dilakukan oleh dewan direksi secara independen.

c) Memiliki struktur, pelaporan, dan tanggung jawab yang sesuai dengan jabatan yang dimiliki.
d) Memiliki komitmen untuk mengambil, mengembangkan, dan menjaga setiap individu yang memiliki potensi untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan.
e) Memegang tanggung jawab pribadi atas pengendalian internal perusahaan.

2) Penilaian Risiko

Setiap perusahaan harus mampu untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Selain mengidentifikasi risiko, perusahaan juga harus mampu menganalisis dan mengelola risiko tersebut. Untuk mampu melakukan penilaian risiko seorang manajemen harus mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi adanya hambatan bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Komponen penilaian risiko ini memiliki 4 prinsip yang diantaranya adalah:

a) Menentukan target dan tujuan perusahaan dengan jelas.
b) Melakukan identifikasi dan analisis terhadap risiko yang ada dan melakukan evaluasi.
c) Mempertimbangkan kemungkinan adanya penipuan.
d) Melakukan identifikasi serta penilaian atas perubahan yang memiliki dampak signifikan bagi sistem pengendalian internal perusahaan.

3) Aktivitas pengendalian

Perusahaan dapat membuat kebijakan dan prosedur pengendalian yang dapat membantu perusahaan untuk memastikan bahwa tindakan yang diidentifikasi oleh manajemen dalam mencapai target perusahaan serta mengatasi risiko dilakukan dengan efektif. Prinsip yang harus dimiliki dan digunakan dalam pengendalian lingkungan ini adalah:

a) Menentukan dan melakukan pengembangan atas kontrol guna mengurangi risiko ke tingkat yang dapat diterima.
b) Menentukan dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum terhadap teknologi.
c) Memperluas kegiatan pengendalian sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang terkait.

4) Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi dan komunikasi mengumpulkan dan saling berbagi informasi yang diperlukan untuk melakukan dan mengendalikan kegiatan operasional perusahaan. Komunikasi perlu dilakukan sebagai bagian dari aktivitas pengendalian internal. Beberapa prinsip terkait dengan komponen ini adalah:

a) Mendapatkan dan menghasilkan informasi yang berguna secara langsung serta memiliki kualitas yang tinggi untuk mendukung pengendalian internal.
b) Mengkomunikasikan informasi secara internal.
c) Mengkomunikasikan masalah terkait dengan pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal.

5) Monitoring

Seluruh kegiatan operasional diawasi serta dilakukan perubahan seperlunya sampai sistem dapat berubah sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Hasil dari pengawasan ini adalah evaluasi yang berguna untuk memastikan bahwa setiap komponen pengendalian internal berfungsi dengan baik. Apabila dari hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan, maka hal tersebut harus segera dikomunikasikan pada waktu yang tepat serta melaporkannya kepada manajemen. Komponen ini memiliki 2 (dua) prinsip dalam pelaksanaannya yaitu:

a) Menentukan, mengembangkan, dan mengevaluasi atas komponen pengendalian internal.
b) Mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan.